



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

## DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2015







*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh,*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 2014 yang merupakan refleksi pencapaian kinerja DJKI selama tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka transparansi atas pencapaian visi dan misi yang telah dilaksanakan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai pelaksana tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual membuat laporan sebagai pertanggungjawaban tertulis berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

LAKIP DJKI disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2015 secara berjenjang dan terukur.

LAKIP mempunyai fungsi sebagai alat kendali, sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja dari setiap unit yang ada di lingkungan DJKI. Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan yang dilaporkan secara transparan kepada masyarakat membantu perwujudan *good governance*. Sedangkan dari fungsi pemacu peningkatan kinerja, laporan ini membantu internal DJKI melaksanakan *self assesment* atas kinerjanya selama ini guna perbaikan di masa mendatang.

Visi DJKI hingga tahun 2019 untuk **“Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum dan Menjadi Pendorong Inovasi, Kreatifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional”** harus mampu dipahami oleh seluruh pegawai DJKI. Dalam visi tersebut terkandung makna bahwa beban yang diemban merupakan tantangan yang harus dilakukan demi terwujudnya profesionalisme, kredibilitas, tranparansi, dan akuntabilitas.

Akhir kata, seiring dengan harapan atas terwujudnya visi tersebut, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai DJKI yang telah memberikan sumbangsih karyanya selama ini dalam membangun DJKI. Saya harapkan kedepan para pegawai DJKI dapat terus memberikan kemampuan terbaiknya dalam berkerja dan melayani masyarakat serta atas kontribusinya dalam upaya peningkatan pemahaman KI masyarakat. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas berbagai kebijakan, arahan dan perhatian yang selama ini diberikan kepada DJKI.



## HAL.2: KATA PENGANTAR

Akhir kata, kiranya Laporan Akuntabilitas ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka memajukan sistem Kekayaan Intelektual Nasional.

*Billahi Taufik Wal Hidayah,  
Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh*

Jakarta, Maret 2016  
Direktur Jenderal

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun 2015 merupakan manifestasi dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan/atau sasaran strategis. Tujuan dan/atau sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015.

Visi DJKI hingga tahun 2019 adalah "Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum dan Menjadi Pendorong Inovasi, Kreatifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional". Dalam mencapai visi tersebut, DJKI sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas mengelola sistem Kekayaan Intelektual (KI) dalam mencapai sasaran menjadikan KI masyarakat Indonesia menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional, mempunyai misi yaitu: 1. Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual ; 2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, DJKI menetapkan tujuan atau sasaran strategis utama yang akan dicapai dalam periode waktu 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan KI;
2. Menyelesaikan permohonan KI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi;
4. Menyelesaikan pelanggaran KI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2015 ini, di lingkungan DJKI Kemenkumham RI telah dihasilkan 3 IKU pada level Direktorat Jenderal. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2015 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka menjaga dan meningkatkan efektifitas pengelolaan kinerja, telah dilaksanakan reviu terhadap kontrak kinerja pada beberapa unit eselon II. Reviu meliputi dokumen dan informasi pendukung penyusunan kontrak kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra) yang memuat pernyataan visi dan misi organisasi, uraian jabatan, tugas dan fungsi, kontrak kinerja tahun sebelumnya, dan IKU.

Implementasi manajemen kerja di DJKI telah berjalan baik walaupun masih butuh banyak penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik lagi. Perbaikan peraturan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan kinerja juga dilakukan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi atau yang belum diatur secara jelas. Untuk itu, DJKI akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang akan menjadi organisasi yang berkinerja tinggi (*high performance organization*).



## HAL.4: EXECUTIVE SUMMARY

Secara umum pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan di tahun 2015 sudah cukup baik, walaupun terdapat realisasi pencapaian target yang belum terpenuhi secara maksimal dan masih ada penurunan realisasi dari target yang telah ditetapkan. Meskipun dengan keterbatasan yang ada baik dari segi sumber daya manusia maupun hal teknis dan non teknis lainnya DJKI tetap dapat mencapai beberapa target yang telah ditetapkan serta tidak menjadi kendala pelaksanaan tugas dan fungsi DJKI. Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan, kedepannya tetap perlu dicari jalan keluar terhadap hambatan yang ada karena hal ini masih merupakan tantangan bagi DJKI untuk dapat meningkatkan target capaian-nya guna menciptakan sistem KI yang efektif dan efisien dalam menopang pembangunan nasional.



<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN</b>	
A. GAMBARAN UMUM .....	<b>6</b>
B. SASARAN & PERMASALAHAN ORGANISASI .....	<b>7</b>
C. STRUKTUR ORGANISASI DJKI .....	<b>9</b>
<b>BAB 2: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, & TARGET KINERJA DJKI TAHUN 2015 .....	<b>10</b>
B. PROGRAM PEMBINAAN & PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL OUTCOME .....	<b>10</b>
C. INDIKATOR KINERJA .....	<b>10</b>
<b>BAB 3: AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. PENGUKURAN KINERJA DJKI TAHUN 2015 .....	<b>17</b>
A.1. PENGUKURAN KINERJA UNIT ESELON II DJKI .....	<b>21</b>
A.2. REALISASI ANGGARAN DJKI TAHUN 2015 .....	<b>32</b>
B. EVALUASI & ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN DJKI TAHUN 2015 .....	<b>33</b>
B.1. EVALUASI & ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DJKI TAHUN 2015 .....	<b>33</b>
B.2. EVALUASI & ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN DJKI .....	<b>38</b>
<b>BAB 4: PENUTUP</b> .....	<b>40</b>



## BAB 1: PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, DJKI mengelola/mengadministrasikan seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual sebagai dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Desain Industri; dan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



### B. SASARAN DAN PERMASALAHAN ORGANISASI

DJKI memiliki peran penting dalam ikut mempersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana saat ini telah diterapkan salah satu faktor kunci dalam kesuksesan suatu industri adalah keberhasilannya dalam mengembangkan dan melindungi kekayaan intelektualnya baik itu berupa Paten, Merek, Desain Industri maupun Hak Cipta. Kekayaan intelektual dapat menjadi *competitive advantage* bagi satu pelaku usaha dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya, di mana hal ini menciptakan karakteristik dan juga kualitas yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan mereka di dalam industri. Adapun peranan DJKI terkait hal ini adalah dengan senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pengadministrasian pendaftaran kekayaan intelektual tersebut dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas akan pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dan penggunaan produk asli serta melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual.

Melalui pengadministrasian pendaftaran kekayaan intelektual yang telah dilaksanakan dengan baik oleh DJKI, diharapkan hal ini akan mendorong percepatan dan kemudahan dalam memulai suatu usaha di Indonesia, selain itu diharapkan lebih lanjut hal ini akan menciptakan suatu iklim usaha dengan persaingan yang sehat diantara para pelakunya khususnya terkait aspek kekayaan intelektual. Dewasa ini masih cukup sering ditemui adanya upaya-upaya persaingan usaha tidak sehat tersebut, di mana pelaku usaha menggunakan suatu kekayaan intelektual yang bukan haknya sehingga berujung kepada gugatan hukum oleh pemilik kekayaan intelektual tersebut. Atas hal ini database yang ada pada DJKI menjadi salah satu pertimbangan utama pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut.

Selain itu, DJKI juga memiliki peran penting dalam mengembangkan inovasi di bidang teknologi di skala nasional, di mana data-data paten daluarsa dapat diakses oleh para peneliti dan badan penelitian nasional dalam rangka menemukan kebaruan atas invensi-invensi yang telah daluarsa tersebut. Hal ini tentunya juga akan memudahkan bagi para peneliti tersebut untuk mengetahui apakah penelitian yang akan dan/atau sedang dilakukannya merupakan invensi yang memiliki kebaruan, sehingga dapat didaftarkan pada DJKI serta memberikan keuntungan bagi masyarakat luas maupun industri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJKI selama tahun 2015 tentunya juga ditemukan beberapa permasalahan namun permasalahan tersebut tidak menjadi hambatan bagi DJKI dalam melaksanakan pelayanan public di bidang Kekayaan Intelektual. Adapun permasalahan yang dihadapi selama tahun 2015 yaitu:

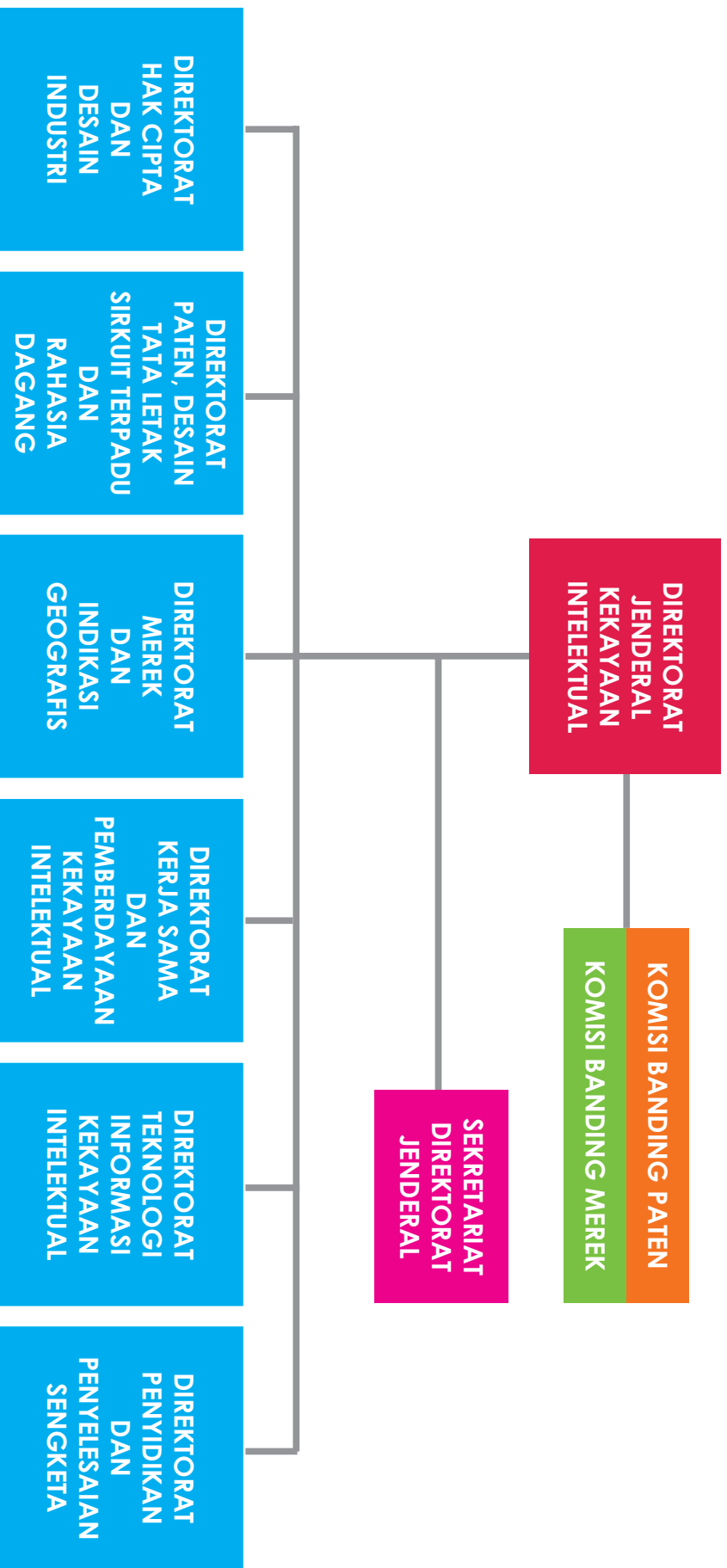


## HAL.8: PENDAHULUAN

- Belum selesainya proses kepindahan DJKI dari Tangerang ke Jakarta (Jl. H.R. Rasuna Said Kav.8-9), yang menyebabkan proses penyelesaian berkas permohonan HKI terkendala jarak antara Jakarta (Penerimaan Permohonan dan Sertifikasi) dengan Tangerang (Pemeriksaan Substantif Permohonan HKI);
- Masih terbatasnya anggaran untuk melaksanakan penindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual;
- Terbatasnya jumlah sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- Belum selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Merek periode Pro-legnas 2015, di mana dalam RUU ini memuat point penting terkait pelaksanaan permohonan pendaftaran merek berdasarkan *Madrid protocol*.



### C. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL





## BAB 2: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja DJKI Tahun 2015

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2015 secara berjenjang dan terukur.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini sendiri disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015–2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015. Adapun Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diemban oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

### B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Outcome:

Terciptanya sistem Kekayaan Intelektual yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.

### C. Indikator Kinerja:

1. Persentase permohonan Kekayaan Intelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Persentase masyarakat yang mengakses informasi Kekayaan Intelektual;
3. Persentase penyelesaian tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual;
4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual.

Adapun target pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diemban oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:



## HAL.11: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	
			2015	2019
1.	Institusi kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum, dan menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	80%	100%
		2. Persentase pemanfaatan sistem online layanan kekayaan intelektual oleh masyarakat	10%	80%
		3. Persentase penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku	60%	80%
		4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual	cukup	Sangat baik

Dalam melaksanakan program pembinaan/ penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual, dan untuk mewujudkan target kinerja/ sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
1.	Sistem Kekayaan Intelektual menjadi Penopang Pembangunan Nasional	1. Persentase perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat.	100% - <u>Menerima 25 Berkas Pengaduan Masyarakat</u> - <u>Melakukan koordinasi penindakan, pemantauan dan evaluasi tindak pidana di bidang KI sebanyak 32 Berkas perkara</u>	<b>Rp. 143.043.103.000,-</b>



## HAL.12: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

	<p>2. Persentase permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum.</p>	<p>100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Hak Cipta 5.500 Permohonan</u></li> <li>- <u>Desain Industri 4.500 Permohonan</u></li> <li>- <u>Paten 2.500 Permohonan</u></li> <li>- <u>Merek 60.000 Permohonan</u></li> <li>- <u>Indikasi Geografis 7 Permohonan</u></li> </ul>	
	<p>3. Persentase jumlah layanan KI yang dapat diakses masyarakat secara elektronik &amp; online.</p>	<p>2.700.000 <u>Kunjungan pada Laman DJKI</u></p>	

Proses penetapan kinerja diatas telah dikomunikasikan antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan arahan dan petunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### 1. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja 2015	Target
1.	Peningkatan kualitas sistem hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang memperoleh perlindungan hukum sesuai standar.	Dokumen permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.500</b> dokumen permohonan pencatatan ciptaan yang diselesaikan.</li> <li>• <b>4.500</b> dokumen permohonan pendaftaran desain industri yang diselesaikan.</li> <li>• <b>3.000</b> dokumen desain industri yang diklasifikasi.</li> <li>• <b>4.500</b> dokumen desain industri yang telah dilakukan pemeriksaan substantif</li> </ul> <p style="text-align: right;">100%</p>

## HAL.13: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



		<p>Persentase pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>77</b> surat rekomendasi cakram optik.</li> <li>• <b>20</b> surat pendapat hukum di bidang hak cipta dan <b>13</b> surat pendapat hukum di bidang desain industri.</li> <li>• <b>71</b> surat pemberian keterangan saksi ahli di bidang hak cipta dan <b>50</b> surat pemberian keterangan saksi ahli di bidang desain industri.</li> <li>• <b>2</b> layanan perkara di bidang hak cipta dan <b>3</b> layanan perkara di bidang desain industri.</li> </ul> <p style="text-align: right;">100%</p>
--	--	---	--

### 2. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja 2015	Target
1.	Peningkatan kualitas sistem paten yang memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan standar.	Dokumen permohonan Paten yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2.500</b> penerbitan sertifikat paten.</li> <li>• <b>24.000</b> dokumen pemeliharaan (pembayaran biaya tahunan, keterlambatan, batal demi hukum), mutasi dan lisensi yang diselesaikan.</li> </ul> <p style="text-align: right;">100%</p>
		Persentase pelayanan hukum di bidang Paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>175</b> layanan hukum yang diselesaikan.</li> </ul> <p style="text-align: right;">100%</p>



## HAL.14: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja 2015	Target
1.	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis.	Dokumen permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>60.000</b> dokumen merek</li> <li>• <b>7</b> dokumen indikasi geografis</li> </ul> <p>100%</p>
		Persentase pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>400</b> layanan hukum yang diselesaikan</li> </ul> <p>100%</p>

### 4. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja 2015	Target
1.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan KI melalui promosi serta implementasi dan aktivitas kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang KI.	Meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.	<p><b>76.000</b> jumlah permohonan pendaftaran kekayaan intelektual tahun 2015, dibanding jumlah permohonan tahun sebelumnya.</p> <p>100%</p>
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap sistem kekayaan intelektual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1.000</b> permohonan KI dari program pemberian insentif KI.</li> </ul> <p>100%</p>
		Dokumen kerjasama bidang kekayaan intelektual yang akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30</b> dokumen kerjasama bidang kekayaan intelektual yang akuntabel.</li> </ul> <p>100%</p>



## 5. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja 2015	Target
1.	Peningkatan jumlah layanan KI yang dapat diakses masyarakat secara <i>online</i> dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat.	Persentase jumlah layanan kekayaan intelektual yang dapat diakses masyarakat secara elektronik dan <i>online</i> .	Dikatakan terpenuhi target 100% jika: <b>2.700.000</b> kunjungan pada Laman DJKI.
		Terselenggaranya dukungan administratif fasilitatif terhadap unit kerja Ditjen KI.	Dikatakan terpenuhi 100% jika: <b>20.000</b> dokumentasi KI berhasil tertata dengan baik secara fisik dan berhasil terdigitalisasi menggunakan <i>scanner</i> dan proses <i>document capture</i> untuk menghasilkan metadata dan arsip digital.

## 6. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja 2015	Target
1.	Peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan pelanggaran bidang KI yang dilakukan penyidikan.	Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual	<b>32</b> Dokumen/berkas penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual 100%
		Persentase penyelesaian sengketa alternatif di bidang Kekayaan Intelektual	<b>32</b> Dokumen/berkas penyelesaian sengketa alternatif di bidang Kekayaan Intelektual 100%



## HAL.16: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 7. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja 2015	Target
1.	Pemberian pelayanan teknis dan administratif yang optimal kepada seluruh satuan organisasi DJKI di bidang perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, tata usaha dan humas, evaluasi dan laporan serta sarana.	Terselenggaranya dukungan administratif fasilitatif terhadap unit kerja DJKI.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1</b> Dokumen pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan administrasi kepegawaian, pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan.</li><li>• <b>5</b> Dokumen pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, perundang-undangan dan organisasi serta evaluasi dan pelaporan.</li><li>• <b>1</b> Dokumen pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.</li><li>• <b>100%</b> Persentase administrasi ketatausahaan yang akuntabel dan terbangunnya citra positif DJKI.</li><li>• <b>1</b> Dokumen pengelolaan BMN, barang persediaan, rumah tangga DJKI dan perjalanan dinas yang transparan dan akuntabel.</li></ul>



### A. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun 2015

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melaksanakan program yang diembannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015. Adapun yang menjadi indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Persentase permohonan Kekayaan Intelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Persentase masyarakat yang mengakses informasi Kekayaan Intelektual;
3. Persentase penyelesaian tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual;
4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual.

Adapun pengukuran dari realisasi indikator kinerja tersebut berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon I DJKI dengan Menteri Hukum dan HAM dan Perjanjian Kinerja Unit Eselon II DJKI dengan Direktur Jenderal KI.





## HAL.18: AKUNTABILITAS KINERJA

	<p>Persentase pemanfaatan sistem online layanan kekayaan intelektual oleh masyarakat</p>	<p><b>2.700.000 hif counter situs internet DJKI</b>  * (berdasarkan Perjanjian Kinerja Unit Eselon II DJKI)</p>	<p>(Jumlah masyarakat yang mengakses layanan Kekayaan Intelektual secara Online/ Target masyarakat yang mengakses layanan Hak Kekayaan Intelektual secara Online 2015) x 100%</p>	Kumulatif	<p>Data Direktorat Teknologi Informasi KI Tahun 2015</p>	<p><b>2.874.686</b></p>	<p><b>106.47%</b></p>	
	<p>Persentase penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p><b>60% dari total 32</b> dokumen/berkas penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual</p>	<p>(Jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang KI tahun berjalan/ jumlah pengaduan tindak pidana di bidang KI yang masuk) X 100%</p>	Kumulatif	<p>Data Statistik Direktorat Teknologi Informasi tahun berjalan</p>	<p><b>34</b></p>	<p><b>177.08%</b></p>	
	<p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual</p>	<p>Cukup</p>		Non Kumulatif				





No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja (Output)	Target 2015	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)	
	A	B							C	D
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL										
1	Institusi kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum, dan menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional		Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<b>80 % dari 72.507</b> (5.500 Surat Pendaftaran Ciptaan/tahun; 4.500 Sertifikat Desain Industri; 2.500 Sertifikat Paten/tahun; 60.000 Sertifikat Merek/tahun; 7 Sertifikat Indikasi Geografis/tahun)	(Jumlah penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, Sertifikat Desain Industri, Paten, Merek dan Indikasi Geografis tahun berjalan/ Target penerbitan Surat Penerbitan Ciptaan, Sertifikat Desain Industri, Paten, Merek dan Indikasi Geografis tahun berjalan) x 100% dari Target 80%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang; Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; Direktorat Paten Tahun 2015	<b>69.170</b> (6.229 Surat Pendaftaran Ciptaan; 3.347 Sertifikat Desain Industri; 1.936 Sertifikat Paten; 57.649 sertifikat Merek; 9 Sertifikat Indikasi Geografis)	<b>119,28%</b> dari 80% target	

## HAL.20: AKUNTABILITAS KINERJA

Persentase pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	3.000	Dokumen Desain Industri yang diklasifikasi	Jumlah dokumen Desain Industri yang diklasifikasi 2015 / Target Jumlah dokumen Desain Industri yang diklasifikasi 2015 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Tahun 2015	4.097	136.57%	105.4%
	4.500	Dokumen Desain Industri yang telah dilakukan pemeriksaan substansif	Jumlah dokumen Desain Industri yang telah dilakukan pemeriksaan substansif 2015 / Target Jumlah dokumen Desain Industri yang telah dilakukan pemeriksaan substansif 2015 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Tahun 2015	4.383	97.4%	
	77	Surat Rekomendasi Cakram Optik	Jumlah Surat Rekomendasi Cakram Optik 2015 / Target Surat Rekomendasi Cakram Optik 2015 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Tahun 2015	47	61.04%	102.725%



## HAL.21: AKUNTABILITAS KINERJA

### A.1. Pengukuran Kinerja Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Output)	Target 2015	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Realisasi (%)	Realisasi (%)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri</b>										
1.	Peningkatan kualitas sistem Hak Cipta dan Desain Industri yang memperoleh perlindungan hukum sesuai standar.	Dokumen permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	5.500	Dokumen permohonan pendaftaran Ciptaan yang diselesaikan	Jumlah dokumen permohonan pendaftaran Ciptaan 2015 / target kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran Ciptaan 2015 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Tahun 2015	6.229	113,25%	105,4%
			4.500	Dokumen permohonan pendaftaran Desain Industri yang diselesaikan	Jumlah permohonan pendaftaran Desain Industri 2015 / Target permohonan pendaftaran Desain Industri 2015 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Tahun 2015	3.347	74,38%	

## HAL.22: AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Output)	Target 2015	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
2.	Peningkatan kualitas sistem Paten yang memperoleh perlindungan hukum sesuai standar.	Dokumen permohonan Paten yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2.500	Penerbitan sertifikat paten	Jumlah Penerbitan Sertifikat Paten 2015 / Target Penerbitan Sertifikat Paten 2015 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten,DTLST, dan Rahasia Dagang 2015	1.936	77.44%	96.705%
		Persentase pelayanan hukum di bidang Paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	175	Layanan hukum yang diselesaikan	Jumlah layanan hukum yang diselesaikan tahun 2015 / Target jumlah layanan hukum yang diselesaikan tahun 2015 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten,DTLST, dan Rahasia Dagang 2015	260	148.57%	148.57%





## HAL.24: AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Output)	Target 2015	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI</b>										
4.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan KI melalui promosi serta implementasi dan aktivitas kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang KI.	Meningkatnya jumlah permohonan pendffaran kekayaan intelektual	<b>76.000</b>	Jumlah permohonan kekayaan intelektual tahun 2015, dibanding jumlah permohonan tahun sebelumnya.	Jumlah permohonan pendaffaran KI tahun 2015/ Jumlah permohonan pendaffaran KI tahun 2015 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Kerja Sama dan Pemberdaya-yaan KI pengisian Monev Anggaran Anggaran 2015	<b>80.918</b>	<b>106.47%</b>	<b>106.47%</b>
								H/D x100%	Persentase per Output (Subdit)	



## HAL.25: AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Output)	Target 2015	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)	
								I H/D x100%	J Persentase per Output (Subdit)
<b>3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis</b>									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Dokumen permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<b>60.007</b> (60.000 Dokumen Permohonan Merek dan 7 Dokumen Indikasi Geografis)	Dokumen	Jumlah Dokumen Permohonan Merek dan Indikasi Geografis 2015 / Target Jumlah Dokumen Permohonan Merek dan Indikasi Geografis 2015 x 100%	Data Statistik Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 2015	<b>57.658</b> (57.649 permohonan Merek dan 9 Permohonan Indikasi Geografis)	<b>96,10%</b>	<b>96,10%</b>
		Persentase pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<b>400</b>	Layanan Hukum yang diselesaikan	Jumlah Layanan Hukum yang diselesaikan 2015 / Target Jumlah Layanan Hukum yang diselesaikan tahun 2015 x 100%	Data Statistik Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pengisian Monev Anggaran tahun 2015	<b>588</b>	<b>147%</b>	<b>147%</b>



## HAL.26: AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Output)	Target 2015	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>5. Direktorat Teknologi Informasi KI</b>										
	Peningkatan jumlah layanan KI yang dapat diakses masyarakat secara on-line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat.	Persentase jumlah layanan keayahan intelektual yang dapat diakses masyarakat secara elektronik dan online	<b>2.700.000</b> (100%)	Kunjungan pada Laman DJKI	Jumlah Realisasi kunjungan pada Laman DJKI 2015 / Target kunjungan pada Laman DJKI 2015 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Teknologi Informasi KI 2015	<b>2.874.486</b>	<b>106.47%</b>	<b>106.47%</b>
	Terselenggaranya dukungan administratif fasilitatif terhadap unit kerja Ditjen KI		<b>20.000</b> (100%)	Dokumentasi KI berhasil tertata dengan baik secara fisik dan berhasil terdigitalisasi menggunakan scanner dan proses document capture untuk menghasilkan metadato dan arsip digital.	Jumlah Dokumentasi KI berhasil tertata dengan baik secara fisik dan berhasil terdigitalisasi menggunakan scanner dan proses document capture untuk menghasilkan metadato dan arsip digital 2015 / Target Dokumentasi KI berhasil tertata dengan baik secara fisik dan berhasil terdigitalisasi menggunakan scanner dan proses document capture untuk menghasilkan metadato dan arsip digital 2015 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Teknologi Informasi KI 2015	<b>20.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>





## HAL.28: AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Output)	Target 2015	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual</b>										
7.	Pemberian pelayanan teknis dan administratif yang optimal kepada seluruh satuan organisasi DJKI di bidang perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, tata usaha dan humas, evaluasi dan laporan serta sarana.	Terselenggaranya dukungan administratif fasilitatif terhadap unit kerja DJKI	1 (100%)	Dokumen pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan administratif kepegawaian, pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan	Realisasi pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan administratif kepegawaian, pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan 2015 / Target dokumen pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan administratif kepegawaian, pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan 2015 X 100%	Kumulatif	Data Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pengisian Monev Anggaran 2015	3.22	322%	322%
			5 100%	Dokumen pelaksanaan koordinasi dan	Jumlah Realisasi Dokumen pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana.	Kumulatif	Data Sekretariat Direktorat	9	180%	180%
								H/D x100%	Persentase per Output (Subdit)	





## HAL.29: AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Output)	Target 2015	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)		
								H/D x100%	Persentase per Output (Subdit)	
<b>6. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa</b>										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	<p>Peningkatan kualitas penyelesaian pengadilan pelanggaran bidang KI yang dilakukan penyidikan.</p>	<p>Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana Kekayaan Intelektual</p>	<p><b>32</b> (100%)</p>	<p>Dokumen/ berkas penyelesaian penyidikan tindak pidana Kekayaan Intelektual</p>	<p>Jumlah Dokumen/ berkas penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual x 100%</p>	<p>Kumulatif</p>	<p>Data Statistik Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa 2015</p>	<p><b>34</b></p>	<p><b>106.25%</b></p>	<p><b>106.25%</b></p>
		<p>Persentase penyelesaian sengketa alternatif di bidang Kekayaan Intelektual</p>	<p><b>32</b> (100%)</p>	<p>Dokumen/ berkas penyelesaian sengketa alternatif di bidang Kekayaan Intelektual</p>	<p>Jumlah Dokumen/ berkas penyelesaian sengketa alternatif di bidang Kekayaan Intelektual 2015 / Target Dokumen/ berkas penyelesaian sengketa alternatif di bidang Kekayaan Intelektual 2015 x 100%</p>	<p>Kumulatif</p>	<p>Data Statistik Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa 2015</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Penetapan indikator kinerja ini untuk meng-akomodasi rencana perubahan ORTA di lingkungan Kementerian yang baru disahkan pada bulan Oktober 2015, sehingga untuk indikator kinerja ini tidak memiliki capaian kinerja.</p>







## HAL.32: AKUNTABILITAS KINERJA

### A. 2. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun 2015

Di bawah ini disajikan data realisasi penyerapan anggaran DJKI selama tahun 2015:

Kode Satker/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK	URAIAN NAMA SATKER, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN MAK	PAGU	REALISASI PAGU	%
<b>013.07.09</b>	<b>Program Pembinaan/ Penyelenggaraan HKI</b>	<b>Rp. 143.043.103.000</b>	<b>Rp. 122.914.521.924</b>	<b>85,93%</b>
1591	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 2.426.000.000	<b>Rp. 1.855.934.125</b>	<b>76,50%</b>
1592	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi HKI	Rp. 6.907.250.000	<b>Rp. 4.288.599.211</b>	<b>62,09%</b>
1593	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 5.894.650.000	<b>Rp. 3.859.826.764</b>	<b>65,48%</b>
1594	Penyelenggaraan Sistem Paten	Rp. 2.086.800.000	<b>Rp. 1.273.335.165</b>	<b>61,02%</b>
1595	Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang HKI	Rp. 2.056.000.000	<b>Rp. 991.970.218</b>	<b>48,25%</b>
1596	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI	Rp. 14.414.500.000	<b>Rp. 12.041.540.339</b>	<b>83,54%</b>
1597	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen HKI	Rp. 109.257.903.000	<b>Rp. 81.722.953.707</b>	<b>74,80%</b>



## B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN DJKI TAHUN 2015

### B.1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja DJKI Tahun 2015

1. Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian permohonan perlindungan hak kekayaan intelektual yang telah diajukan oleh masyarakat adalah salah satu prioritas DJKI pada periode Renstra 2015-2019. Hal ini menjadi faktor penentu bagi masyarakat selaku pemohon HKI dalam melakukan aktivitas bisnisnya maupun upaya pemanfaatan atas kekayaan intelektual mereka. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, DJKI menangani pelayanan Kekayaan Intelektual untuk bidang:

- a. Hak Cipta;
- b. Paten;
- c. Merek;
- d. Desain Industri;
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
- f. Rahasia Dagang.

Sampai saat ini, belum terdapat permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang diajukan oleh masyarakat. Sementara itu untuk bidang kekayaan intelektual lainnya jumlah permohonan kekayaan intelektual senantiasa meningkat setiap tahunnya. Hal ini sendiri merupakan tantangan bagi DJKI untuk dapat menyelesaikan permohonan yang telah diterima tersebut.

Tabel 1

Jenis HKI	Realisasi 2015	Target 2015	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012	Realisasi 2011
Hak Cipta	6.229	1.500	4.475	5.071	7.302	4.117
Desain Industri	3.347	4.000	4.456	5.011	6.991	5.367
Paten	1.936	2.916	2.030	2.552	2.252	2.825
Merek dan IG	57.658	50.000	51.939	34.264	37.482	56.993
<b>Total</b>	<b>69.170</b>	<b>58.416</b>	<b>62.900</b>	<b>46.898</b>	<b>54.027</b>	<b>69.302</b>

#### Permohonan Kekayaan Intelektual yang Mendapat Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum adalah permohonan baik permohonan baru maupun permohonan perpanjangan yang telah diberikan keputusan oleh DJKI terkait status permohonan diterima, ditolak atau dibatalkan demi hukum.





## HAL.34: AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun realisasi pada tahun ini adalah sebanyak **69.170** permohonan kekayaan intelektual telah memperoleh kepastian hukum. Angka tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun ini yakni sebanyak 80% dari total **72.507** permohonan memperoleh kepastian hukum (atau sebanyak **58.000** permohonan). Keberhasilan DJKI dalam menyampaikan target kinerja ini tidak lepas dari keberhasilan DJKI dalam membangun aplikasi pendukung pelaksanaan pengadministrasian permohonan kekayaan intelektual atau yang disebut dengan IPAS (*Industrial Property Automation Systems*).

Selain itu keberhasilan DJKI dalam mencapai target yang telah ditetapkan juga tidak lepas dari sosialisasi terus menerus kepada seluruh pegawai DJKI agar melaksanakan tugas pelayanan masyarakat sebaik mungkin sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat yang telah mempercayakan permohonan pendaftaran kekayaan intelektualnya dan wujud tanggung jawab atas tunjangan kinerja yang telah diterima selama ini.

2. Layanan Hak Kekayaan Intelektual yang bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat.

Sasaran strategis lainnya dari DJKI adalah memberikan layanan Hak Kekayaan Intelektual yang bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat. Di mana dalam hal ini DJKI dituntut untuk dapat memberikan informasi terkait HKI kepada masyarakat secara tepat, cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengkomodir hal tersebut diatas pada website DJKI ([www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)) telah disediakan berbagai informasi HKI yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat diakses secara *online* 24 jam. Adapun realisasi pada hit counter pada website DJKI adalah sebanyak **2.874.686** kali akses. Hasil ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2013 sebanyak 2.944.998 kali akses, tahun 2013 sebanyak 1.097.547 kali akses dan Tahun 2012 sebanyak 334.524 kali akses.

3. Persentase penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator ini telah menunjukkan dengan tindak pidana pelanggaran HKI yang dialami masyarakat. Yang perlu menjadi catatan adalah pada tahun ini DJKI menargetkan penyelesaian atas pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pelanggaran HKI sebanyak **32** laporan dan realisasinya telah diterima pada tahun 2015 sebanyak **34** laporan. Capaian ini meningkat jika dibanding capaian tahun 2014, dimana telah diselesaikan dugaan tindak pidana di bidang KI sebanyak 14 laporan pengaduan masyarakat. Hal ini menunjukkan telah tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada DJKI dalam menangani perkara hukum dibidang kekayaan intelektual, saat ini pelaksanaan penerimaan pelaporan dugaan pelanggaran atas kekayaan intelektual.





Sedangkan capaian kinerja DJKI di bidang perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual sejak tahun 2011 hingga 2015 adalah sebagai berikut:

- **Penindakan** : 13 Laporan
- **SP3** : 3 Laporan
- **Adanya sengketa hak** : 2 Laporan
- **Persiapan Penindakan** : 17 Laporan

#### 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual.

Untuk melaksanakan pengukuran indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan DJKI maka telah dilaksanakan dengan menyerahkannya kepada pihak ketiga yang dipilih melalui metode pelelangan seleksi umum. Namun, penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, menyatakan mengundurkan diri, dengan alasan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak memadai untuk dilakukan survey sebagaimana output yang diharapkan. Sehingga untuk tahun 2015, DJKI belum melakukan pengukuran kepuasan pelanggan atas layanan kekayaan intelektual.

#### 1. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Selama kurun waktu 2015 Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri menyelesaikan permohonan pendaftaran Hak Cipta sebanyak 6.229 permohonan (113.25%) dari 5.500 permohonan yang ditargetkan. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2014 yang menyelesaikan sebanyak 5.130 permohonan (80.16%); sedangkan pada Desain Industri telah diselesaikan permohonan pendaftaran Desain Industri sebanyak 3.347 permohonan (74.38%), capaian ini terjadi penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2014 yang menyelesaikan sebanyak 3376 permohonan (78.5% dari jumlah yang ditargetkan). Selain itu permohonan Desain Industri yang berhasil diklasifikasikan sebanyak 4.097 permohonan (136.57% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 3.000 permohonan), jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebanyak 3510 permohonan (117%). Sedangkan pada tahun 2015 telah diselesaikan pemeriksaan substantif Desain Industri sebanyak 4.383 dokumen (97.4% target tercapai), jumlah ini menunjukkan adanya sedikit penurunan capaian kinerja jika dibanding tahun 2014 yang mencatatkan sebanyak 4907 dokumen (109.04%) pemeriksaan substantif Desain Industri.

Pada bidang pelayanan hukum, DJKI mengalami peningkatan yang signifikan pada pemberian surat pendapat hukum yang mencapai sejumlah 96 surat pendapat hukum dari 33 surat pendapat hukum yang ditargetkan (tercapai 290.90% dari target), sedangkan pada tahun sebelumnya hanya terdapat sebanyak 19 surat pendapat hukum. Pencapaian dalam pemberian surat keterangan ahli pada tahun 2015 terjadi penurunan jika dibanding tahun 2014. Tahun 2015 tercatat 53 surat keterangan saksi ahli yang diberikan (43.80% dari jumlah yang



## HAL.36: AKUNTABILITAS KINERJA

ditargetkan) sedangkan tahun 2014 tercatat sebanyak 98 surat keterangan saksi ahli (80.99% dari jumlah yang ditargetkan). Capaian di bidang pelayanan hukum menunjukkan adanya target yang belum tercapai, hal ini dikarenakan penargetan diawal tahun didasarkan pada *trend* tahun sebelumnya. Namun dari segi kualitas dalam melakukan pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri telah diselesaikan seluruh permohonan pelayanan hukum yang dimintakan oleh masyarakat ataupun pihak terkait dibidang KI.

### **2. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DLTST), dan Rahasia Dagang (RD)**

Dalam kurun waktu 2015, Direktorat Paten, DLTST, dan Rahasia Dagang telah menyelesaikan permohonan paten dalam bentuk penerbitan sertifikat Paten sebanyak 1.936 (77.44% dari jumlah yang ditargetkan). Jumlah ini memang mengalami penurunan disbanding tahun 2014 yang menerbitkan sebanyak 2.308 sertifikat Paten. Capaian pada tahun ini juga belum mencapai target yang ditetapkan karena penyelesaian permohonan tidak hanya terhadap permohonan yang masuk tahun 2015 namun juga permohonan yang masuk pada tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena untuk mencapai tahap pemeriksaan permohonan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun setelah permohonan pendaftaran diterima. Selama tahun 2015 juga telah dilakukan pemeliharaan dokumen sebanyak 27.833 dokumen. Jumlah ini melebihi target yang telah ditetapkan (115.975).

Sementara dibidang pelayanan hukum, telah diberikan sebanyak 260 (148.57%) layanan hukum yang diselesaikan dibidang paten. Pencapaian ini mengalami peningkatan signifikan jika disbanding tahun 2014 yang baru mencapai 129 pelayanan hukum Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam memberikan penguatan layanan hukum dari DJKI.

### **3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (IG)**

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (IG) selama kurun waktu 2015 telah menyelesaikan dokumen permohonan sebanyak 57.658 (57.649 permohonan Merek dan 9 permohonan IG), jumlah ini mencapai 96.10% dari jumlah yang ditargetkan. Jumlah ini juga merupakan jumlah sertifikat Merek dan IG yang telah diterbitkan. Capaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yang mencatat 36.619.

Pada bidang pelayanan hukum, Direktorat Merek dan IG pada tahun 2015 telah menyelesaikan 588 layanan hukum, jumlah ini telah melampaui target yang ditetapkan (147%). Capaian ini juga menunjukkan adanya peningkatan layanan hukum di bidang Merek dan IG jika dibanding tahun sebelumnya yang mencatatkan sebanyak 289 pelayanan hukum.



#### 4. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI dalam pelaksanaan tugasnya telah membantu meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran KI sebanyak 80.918 permohonan. Capaian ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2014 yang mencatatkan sebanyak 78.000 permohonan KI. Capaian tahun 2015 juga telah melampaui target sebesar 106.47% dari jumlah yang ditargetkan. Sedangkan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang pada saat tahun 2015 berjalan tidak jadi termasuk ke dalam salah satu indikator kinerja yaitu pada indikator kinerja "Meingkatnya pemahaman masyarakat terhadap sistem kekayaan intelektual". Adapun hal tersebut terjadi karena indikator kinerja tersebut termasuk di dalam salah satu kegiatan yang mendapat efisiensi anggaran. Capaian yang menggambarkan tugas dan fungsi dari Direktorat KSP KI salah satunya terwujud dalam kerja sama di bidang KI yang telah dilakukan yaitu dilakukan sebanyak 30 kerja sama pada tahun 2015. Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan (123.33%).

#### 5. Direktorat Teknologi Informasi KI

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan KI yang dapat diakses masyarakat secara *online* dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat selama tahun 2015 Direktorat Teknologi Informasi KI telah melakukan penataan atas 20.000 dokumen yang dilakukan baik secara fisik maupun digital (proses digitalisasi) guna menghasilkan metadata dan arsip digital. Jumlah tersebut telah memenuhi target 100% dari jumlah yang ditargetkan. Kegiatan tersebut juga dilakukan dalam rangka mencapai *outcome* untuk memberikan informasi mengenai KI pada umumnya dan DJKI pada khususnya kepada masyarakat melalui *website* resmi DJKI. Adapun jumlah akses masyarakat ke *website* DJHKI ([www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)) mencapai 2.874.686 *Hit Counter* atau 106.47% dari yang ditargetkan. Jumlah ini sedikit mengalami penurunan jika dibanding tahun 2014, namun dari segi konten *website*, pada tahun 2015 DJKI melalui Direktorat Teknologi Informasi KI telah melengkapi dan menyeleraskan informasi terkait KI secara lebih intens, baik kuantitas maupun kualitas dari penyajian.

#### 6. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada tahun 2015 telah menyelesaikan penyidikan tindak pidana di bidang KI sebanyak 34 kasus. Jumlah ini sudah melampaui dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebanyak 32 (106.25% tercapai). Capaian ini meningkat jika dibanding capaian tahun 2014, dimana telah diselesaikan dugaan tindak pidana di bidang KI sebanyak 14 laporan pengaduan masyarakat. Sedangkan satu indikator kinerja lainnya yaitu "Persentase penyelesaian sengketa alternatif di bidang Kekayaan Intelektual" belum dapat terealisasi sepenuhnya, mengingat penetapan indikator kinerja tersebut pada awalnya untuk



## HAL.38: AKUNTABILITAS KINERJA

mengakomodasi adanya perubahan susunan ORTA di lingkungan Kemenkumham c.q. DJKI, termasuk juga pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa yang sebelumnya bernama Direktorat Penyidikan. Namun perubahan susunan ORTA tersebut baru disahkan pada Bulan Oktober 2015, sehingga susunan perangkat SDM untuk mengakomodasi salah satu tupoksi utama dari Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa belum terpenuhi. Hal ini berimplikasi pada kinerja penyelesaian sengketa alternatif di bidang Kekayaan Intelektual tersebut.

### **7. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**

Sebagai salah satu Unit Eselon II DJKI yang mendukung DJKI dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DJKI mencatatkan capaian yang sangat baik. Hal ini bisa terlihat dari tercapainya bahkan terlampauinya target yang ditetapkan bagi Sekretariat DJKI dalam mencapai kinerja yang optimal. Pada tahun 2015 tercapai 3,22 dokumen pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan administrasi kepegawaian, pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan (sekitar 322% dari target yang telah ditetapkan). Selanjutnya capaian pada pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, perundang-undangan dan organisasi serta evaluasi dan pelaporan telah tersusun sebanyak 9 dokumen (180% tercapai dari jumlah target yang ditetapkan). Tahun 2015 juga mencatatkan bahwa telah tersusunnya sebanyak 1.14 dokumen pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel (114% tercapai dari jumlah yang ditargetkan). Sedangkan pada persentase administrasi ketatausahaan yang akuntabel dan terbangunnya citra positif DJKI telah terpenuhi target sebesar 100% dari persentase yang ditetapkan. Adapun pada target kinerja pengelolaan BMN, barang persediaan, rumah tangga DJKI dan perjalanan dinas yang transparan dan akuntabel telah tersusun 1 (satu) dokumen atas target tersebut (100% dari jumlah yang ditargetkan).

### **B.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan DJKI**

Sebagai instansi pemerintah pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DJKI juga memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran APBN pada tahun 2015. Sebagai instansi pemerintah pelaksana pelayanan publik sekaligus pemungut Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI ditargetkan untuk dapat memperoleh PNPB sebesar Rp309.000.000.000,00 yang terdiri atas seluruh pelayanan permohonan HKI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun dari sisi penerimaan permohonan HKI terdapat beberapa target capaian yang tidak tercapai, namun DJKI tetap dapat mencapai target PNPB yang telah



dibebankan, adapun realisasi penerimaan PNBP DJKI pada tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 347.476.119.619,00**, jumlah ini telah melampaui dari target yang ditetapkan atau sekitar 112.45 % dari yang ditargetkan. Adapun penerimaan PNBP DJKI selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun	Jumlah
1	Pendapatan Hak dan Perijinan	2010	Rp 214,086,293,000
2	Pendapatan Hak dan Perijinan	2011	Rp 224,690,302,750
3	Pendapatan Hak dan Perijinan	2012	Rp 249,210,787,750
4	Pendapatan Hak dan Perijinan	2013	Rp 267.393.327.750
5	Pendapatan Hak dan Perijinan	2014	Rp 289.421.451.405
6	Pendapatan Hak dan Perijinan	2015	Rp 347.476.119.619

Adapun penyerapan anggaran DJKI selama tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 108.701.657.838** atau **74,28%** dari pagu anggaran namun seluruh kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan seluruhnya sehingga sisa anggaran pada tahun ini adalah sisa anggaran penghematan atas pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu sebesar **Rp. 37.641.445.162,00**.



## BAB 4: PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Selama tahun 2015 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat dikatakan telah melakukan tugas melaksanakan kebijakan KI dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat realisasi pencapaian pada beberapa indikator target yang belum terpenuhi secara maksimal. Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh DJKI pada tahun ini diantaranya adalah proses perpindahan yang belum rampung serta sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan, ke depan tetap perlu dicari jalan keluar terhadap hambatan yang ada karena hal ini masih merupakan tantangan bagi DJKI untuk dapat meningkatkan target capaiannya guna mencapai visi DJKI "Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum dan Menjadi Pendorong Inovasi, Kreatifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional".



